

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang menandai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik makanan maupun non-makanan.(BPS, 2011). Secara global, kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya yang meluas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan publik. Kondisi kemiskinan mengakibatkan kualitas hidup yang rendah, terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya menciptakan siklus kemiskinan yang berulang.(World Bank, 2025)

Kemiskinan merupakan persoalan global yang bersifat kompleks, multidimensional, dan berlangsung secara berkelanjutan. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan atau keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, peluang, serta kesejahteraan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama dari tujuh belas agenda pembangunan berkelanjutan, karena kemiskinan dipandang sebagai akar dari berbagai permasalahan sosial dan ekonomi lainnya. Walaupun sebagian negara menunjukkan kemajuan dalam menekan angka kemiskinan, kesenjangan antarnegara maupun antarkelompok masyarakat tetap menjadi tantangan yang

signifikan. Kondisi ini terutama dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih menghadapi berbagai kendala struktural dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai kebijakan dan program sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan miskin. Pemerintah mengembangkan beberapa program utama, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Indonesia Pintar (KIP), yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Di samping itu, pemerintah juga mendorong berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna membuka peluang kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Nur Assyafaah et al., 2025).

Namun demikian, permasalahan kemiskinan belum dapat teratasi secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Beragam kebijakan tersebut memang menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional, tetapi masih terdapat ketimpangan yang cukup nyata antarwilayah, baik antara perkotaan dan perdesaan maupun antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia secara simultan. Kemiskinan pada hakikatnya mengacu pada keadaan kesengsaraan dan

ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun karena ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya (Wahyu Azizah *et al.*, 2018).

Terdapat dua standar yang mengatakan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi negara di bidang statistik. BPS menyusun standar ini melalui perhitungan ilmiah berbasis survei (Susenas) dengan metode “kebutuhan dasar” (*cost of basic needs/CBN*), yaitu menghitung jumlah pengeluaran minimum per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam pendekatan ini, komponen makanan dihitung berdasarkan biaya untuk memperoleh paket pangan yang setara sekitar 2.100 kilokalori per orang per hari, sedangkan komponen bukan makanan mencakup pengeluaran pokok seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan transportasi (BPS, 2025). Per September 2024, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp595.242 per kapita, terdiri dari Rp443.433 untuk makanan (74,5%) dan Rp151.809 (25,5%) untuk kebutuhan non-makanan. Berdasarkan ukuran ini, 8,57% atau sekitar 24 juta jiwa penduduk Indonesia diklasifikasikan sebagai miskin (shofihawa, 2025).

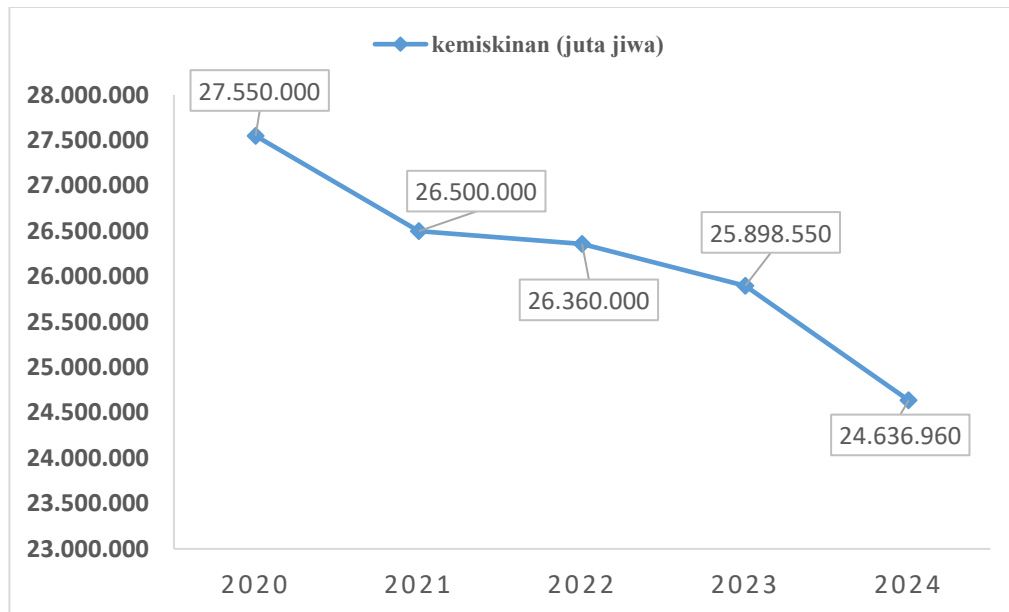
Standar kemiskinan menurut World Bank (Bank Dunia) ditetapkan dalam bentuk garis kemiskinan global yang dinyatakan sebagai jumlah dolar Amerika per kapita per hari dengan penyesuaian paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Bank Dunia menggunakan standar ini untuk memantau kemiskinan

secara internasional dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, bukan untuk menggantikan garis kemiskinan nasional masing-masing negara (*World Bank*, 2025). Dalam pembaruan terbaru yang menggunakan data PPP 2021, Bank Dunia menetapkan tiga garis kemiskinan global utama, yaitu: garis kemiskinan ekstrem sebesar 3,00 dolar AS per kapita per hari yang mencerminkan median garis kemiskinan nasional negara-negara berpendapatan rendah; garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) sebesar 4,20 dolar AS per kapita per hari; dan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) sebesar 8,30 dolar AS per kapita per hari. Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas secara internasional biasanya dianalisis dengan garis sekitar 6,85–8,30 dolar PPP per hari dengan tujuan utama membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan memantau kemiskinan global, sehingga tidak dimaksudkan menggantikan garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (*GoodStat*, 2025).

Nilai tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan batas garis kemiskinan sekitar Rp600 ribu per kapita per bulan yang ditetapkan oleh BPS. Perbedaan standar ini berdampak pada variasi dalam persentase jumlah penduduk miskin. Berdasarkan kriteria BPS, persentase penduduk miskin berada pada kisaran 8–9% atau sekitar 24 juta jiwa. Namun, apabila menggunakan standar yang ditetapkan oleh *World Bank*, proporsi tersebut dapat meningkat hingga lebih dari 50–60% dari total penduduk. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat pengeluaran di

antara Rp600 ribu hingga Rp1,2–1,5 juta per kapita per bulan (CNBC INDONESIA, 2025).

Untuk mengetahui kondisi Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam Gambar 1.1, menggambarkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2020–2024 yang menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari 27,55 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 24,64 juta jiwa pada tahun 2024. Meski demikian, tahun 2020 tercatat sebagai puncak kemiskinan tertinggi dalam lima tahun terakhir, karena jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut 22,55 juta jiwa akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan pasar tenaga kerja menyebabkan banyak para pekerja yang di mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan (Katadata, 2021).

Tahun berikutnya di 2021, angka kemiskinan di Indonesia kembali menurun sampai tahun 2024 yaitu menjadi 24,63 juta jiwa yang berarti menurun sebanyak 1,26 juta jiwa dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi *Covid-19* dan program bantuan sosial yang efektif dari pemerintah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021), antara lain berupa seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Prakerja. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan finansial langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. paling terdampak. Selain bantuan sosial, pemerintah juga menerapkan berbagai pendorong ekonomi untuk mendukung sektor usaha, termasuk pemberian insentif pajak, bantuan untuk UMKM, dan penangguhan pembayaran kredit. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat (Saputra *et al.*, 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah, karena peningkatan output dan pendapatan nasional dapat mendorong terciptanya peluang kerja baru serta meningkatkan pendapatan rumah tangga (Nansadiqa, 2024). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan utama. Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung disertai peningkatan ketimpangan pendapatan dan tingginya tingkat kemiskinan, namun ketika pembangunan memasuki tahap yang lebih maju, distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan kemiskinan mulai menurun. Pandangan ini sejalan dengan konsep

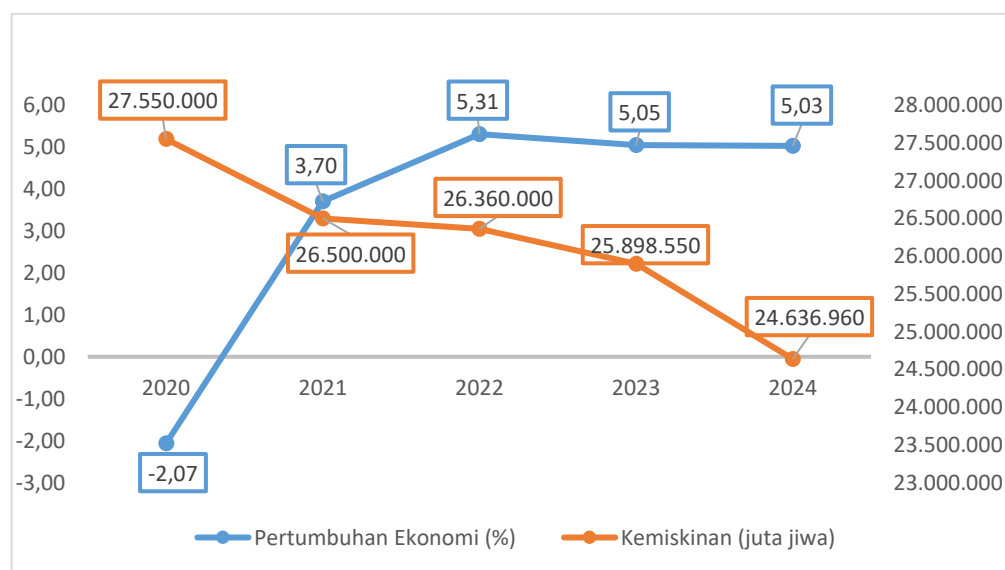
trickle-down effect, yang berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awalnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi dan sektor modern, tetapi dalam jangka panjang manfaat pertumbuhan tersebut akan ‘menetes ke bawah’ melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, dan meluasnya aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan. Secara akademik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan (Boari *et al.*, 2024). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada ekspansi kapasitas produksi suatu perekonomian, yang berasal dari output yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, sehingga memungkinkan evaluasi kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor-sektor tersebut selama periode waktu tertentu. (Todaro, 2011) dalam (Syafriana, 2023 : 272).

Pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu, juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sering diukur melalui pendapatan domestik regional bruto. Ketika ekonomi suatu negara atau daerah mengalami perkembangan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan kondisi perekonomian yang sehat dan berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi telah lama diakui sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi (Mukamad Rofii & Sarda Ardyan, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Palembang pada tahun 2022, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang

signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi cenderung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di daerah tersebut (Meiliza *et al.*, 2025). Selain itu Penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (Alfionika *et al.*, 2021) yang artinya peningkatan pertumbuhan memiliki korelasi yang kuat dengan penurunan kemiskinan di suatu wilayah.

Untuk mengetahui kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini



Gambar 1. 2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber : *World Bank*, 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 1.2. bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Kemiskinan (KMK) selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi memperlihatkan fluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan

jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun secara konsisten sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat – 2,07%, Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin mencapai 27.55 juta jiwa, menjadi level tertinggi dalam lima tahun terakhir. hal tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020 membuat aktivitas ekonomi Indonesia menurun tajam, banyak perusahaan formal dan informal kehilangan pendapatan hingga melakukan PHK atau bangkrut, sementara pembatasan perjalanan dan turunnya wisatawan menyebabkan pendapatan sektor transportasi udara, hotel, dan restoran terutama di daerah wisata anjlok sehingga ikut memperdalam kontraksi ekonomi nasional (DJKN, 2021).

Ditahun berikutnya, Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan sekitar 3,70 persen pada 2021 dan naik menjadi 5,31 persen pada 2022, sementara jumlah penduduk miskin turun dari 27,55 juta jiwa pada 2020 menjadi 26,50 juta jiwa pada 2021 dan 26,36 juta jiwa pada 2022, sehingga kedua tahun ini menggambarkan awal pemulihan pasca pandemi yang perlahan membantu menurunkan kemiskinan dengan cara pelonggaran pembatasan aktivitas membuat masyarakat kembali bekerja dan berbelanja sehingga kinerja sektor industri, perdagangan, transportasi, dan jasa komunikasi mulai pulih, sementara pada saat yang sama pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui bantuan tunai, subsidi upah, peningkatan belanja kesehatan, serta dukungan bagi UMKM berupa insentif pajak, keringanan dan restrukturisasi kredit, serta pembiayaan modal kerja yang berperan menjaga daya

beli masyarakat dan membantu usaha kecil bertahan agar tidak bangkrut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Sementara itu, pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,05% dari 5,31% pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk kemiskinan justru menurun pada tahun 2023 menjadi 25.89 juta jiwa dari 26.36 juta jiwa pada 2022. Fenomena ini tampak tidak sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh adanya intervensi kebijakan pemerintah yang intensif dalam program perlindungan sosial dan bantuan langsung tunai, serta stimulus ekonomi yang mendukung daya beli masyarakat kurang mampu (SMERU, 2020).

Secara spesifik, pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 89,3% serta bantuan sembako sebesar 86,5% telah terbukti efektif dalam mempertahankan daya beli kelompok masyarakat miskin. Kondisi tersebut diperkuat oleh pengendalian inflasi yang berhasil diturunkan menjadi 1,32% (dari tingkat sebelumnya 3,60%), sehingga harga bahan makanan pokok dapat dijaga stabil. Selain itu, subsidi energi senilai Rp551 triliun mencegah lonjakan harga pangan yang drastis, seperti yang dialami pada Juli 2022 dengan inflasi mencapai 11,5%. Di samping itu, penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,45% dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 110,85 telah berkontribusi pada penguatan pendapatan sekitar 40% penduduk miskin di wilayah pedesaan. Integrasi antara perbaikan kondisi sosial-ekonomi dan distribusi bantuan sosial yang akurat telah berhasil menghilangkan korelasi negatif yang umum antara

perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tingkat kemiskinan (Mardiyanto, 2023).

Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebutuhan hidupnya, mereka akan terdorong untuk menjadi individu yang produktif. Kenaikan jumlah penduduk produktif ini berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan, karena mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Selain itu, peningkatan produktivitas penduduk tersebut juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional (Samputra & Munandar, 2019). Permasalahan yang harus dihadapi selanjutnya adalah ketersediaan lapangan kerja yang memadai guna menyerap tenaga kerja yang ada. Ketika tenaga kerja yang tersedia tidak terserap secara optimal, hal ini menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kemiskinan. Hubungan ini didukung oleh kajian empiris yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia (Prasetya & Sumanto, 2022).

Pengangguran didefinisikan sebagai individu yang telah termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut, sehingga aktifitas pencarian kerja menjadi kriteria utama pengangguran selain ketidakberadaan pekerjaan. pengangguran dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran friksional yang terjadi akibat proses perpindahan kerja atau pencarian pekerjaan baru, pengangguran struktural yang

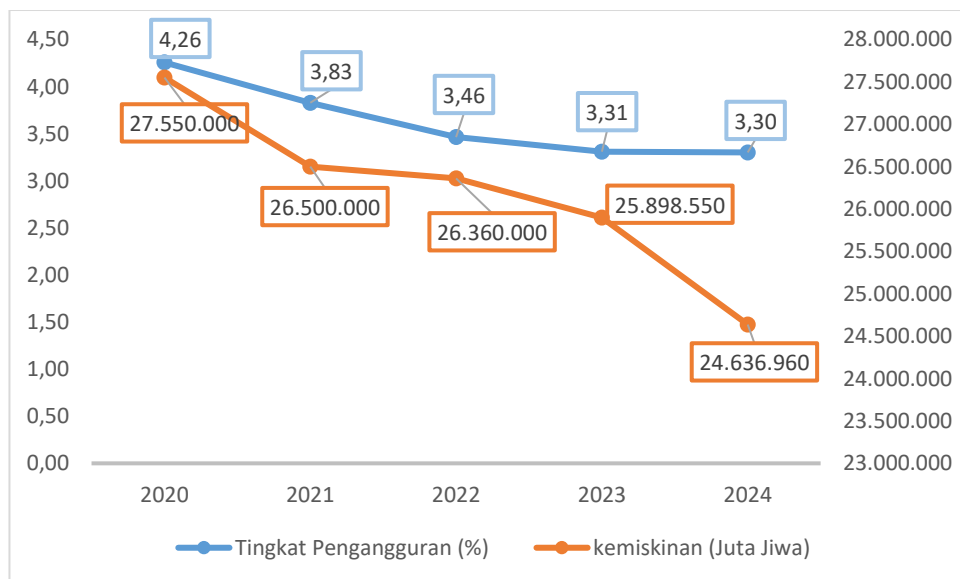
timbul karena adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, pengangguran siklis atau konjungtural yang muncul akibat penurunan aktivitas ekonomi atau resesi, serta pengangguran musiman yang bergantung pada siklus pekerjaan tertentu (Rahmat, 2025).

Di Indonesia, tantangan ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan adalah pengangguran struktural dan tingginya pengangguran di kalangan kaum muda (usia 15–24 tahun). Pengangguran struktural dianggap sangat krusial karena berakar pada transformasi ekonomi dan kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja, sehingga menciptakan kesenjangan antara ketersediaan lowongan kerja dengan kompetensi pencari kerja yang sulit diselesaikan dalam jangka pendek (Liasari, 2024). Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena sistem pendidikan sering kali tertinggal dari pesatnya perubahan teknologi, sehingga banyak lulusan tidak terserap secara produktif di pasar kerja. Jika dibiarkan, fenomena ini akan menghambat bonus demografi, menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional, serta memicu beban sosial dan kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Witta & Handra, 2025).

Menurut Badu *et al.*, (2020) Penurunan tingkat pengangguran diantisipasi dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Pengangguran berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan melalui dampaknya pada tingkat pendapatan individu. Apabila seseorang mengalami pendapatan rendah akibat keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, maka individu tersebut tidak dapat dihindari

akan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi krusial.

Untuk mengetahui kondisi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.3 dibawah ini



Gambar 1. 3 Grafik Persentase Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber : *World Bank*, 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar 1.3 bahwa Tingkat Pengangguran (TP) dan kemiskinan (KMK) di Indonesia cenderung menurun pada 5 tahun terakhir. pada tahun 2020 pada angka 4,26% Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin mencapai 27.55 juta menjadi level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh adanya virus penyakit *covid-19* yang masuk ke Indonesia mendorong banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan permintaan pasar. Kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol jaga

jarak sosial membatasi ruang gerak pelaku usaha serta konsumen, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran yang ada (Angkasa *et al.*, 2021).

Di tahun berikutnya 2021, mengalami penurunan kembali sebesar 3,83% sampai di tahun 2024 menjadi 3,30% Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin juga terus mengalami penurunan 26,50 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 24,63 juta jiwa pada tahun 2024 Penurunan tingkat pengangguran pada periode tersebut tidak terlepas dari proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Seiring dengan semakin longgarnya pembatasan aktivitas masyarakat, berbagai sektor usaha mulai kembali berjalan secara normal sehingga kebutuhan tenaga kerja meningkat. Kondisi ini mendorong bertambahnya penyerapan tenaga kerja dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan secara bertahap. Di samping itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk perlindungan sosial dan dukungan pemulihan ekonomi turut membantu menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan. Dengan demikian, menurunnya tingkat pengangguran berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin (Darsono *et al.*, 2023).

Fenomena ini menggambarkan betapa krisis kesehatan global dapat berimplikasi luas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang memerlukan respons kebijakan yang cepat dan terintegrasi untuk mitigasi dampaknya. Penurunan tingkat pengangguran memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga yang rentan, sehingga mengurangi risiko kemiskinan ekstrem. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengurangan pengangguran berperan sebagai salah satu

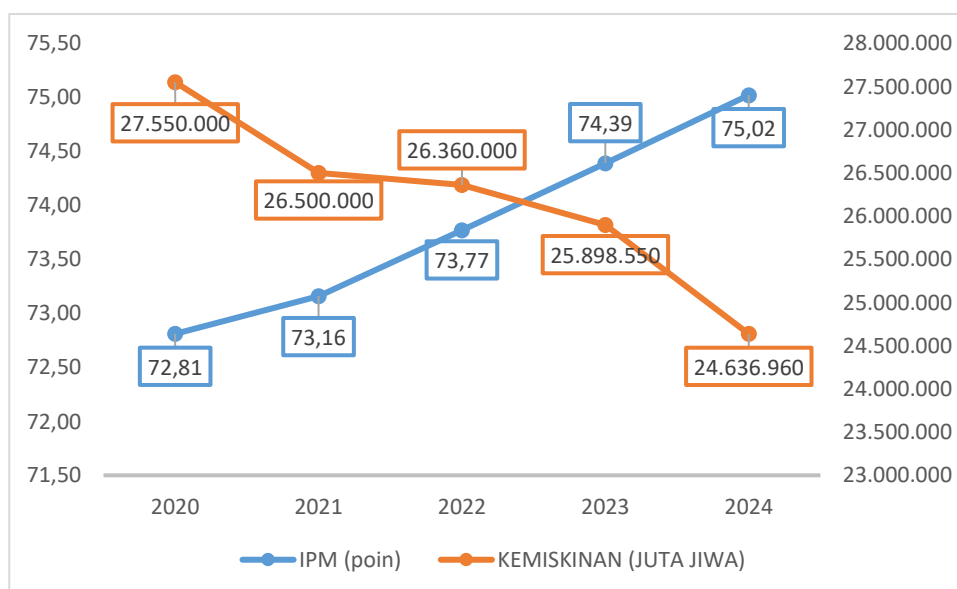
faktor utama dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan di Indonesia (Illahi & Sentosa, 2025).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan keahlian tersebut dapat mendorong produktivitas kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan (Hardana, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Di Indonesia, ketiga dimensi tersebut menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun, yang tercermin dari peningkatan IPM nasional (Napitupulu *et al.*, 2025). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi merupakan faktor kunci yang menentukan kapasitas penduduk dalam mengadopsi dan mengelola sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan dalam pemanfaatan teknologi serta penguatan kelembagaan yang berperan sebagai sarana esensial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Utami, 2020).

Penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan IPM rendah biasanya mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, yang menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Berbagai penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi secara signifikan pada penurunan angka kemiskinan, sehingga program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi menjadi strategi utama dalam pengentasan kemiskinan (Mukhtar et al., 2019).

Untuk mengetahui kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.4 dibawah ini



Gambar 1. 4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024

Sumber : *World Bank*, 2024 dan Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 1.4 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan di Indonesia selama periode lima tahun terakhir, pada tahun 2020 Indeks Pembangunan manusia (IPM) tercatat pada 72,81 Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin mencapai 27.55 juta jiwa, menjadi level tertinggi dalam lima tahun terakhir disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama menurunnya belanja riil per kapita akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi, serta perlambatan dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan. Selain itu, pandemi menyebabkan peningkatan kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup dan kesempatan pendidikan masyarakat (Nurfilah & Satiti, 2022).

Berikutnya tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 73,16 sampai di tahun 2024 menjadi 75,02, pada tahun yang sama jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan 26,40 juta jiwa menjadi 24,63 juta jiwa pada tahun 2024 Fenomena ini dapat dijelaskan karena peningkatan IPM mencerminkan perbaikan pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang pada akhirnya memperkuat produktivitas masyarakat dan menurunkan kerentanan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, penurunan kemiskinan juga didukung oleh pemulihan ekonomi, penguatan daya beli masyarakat, serta efektivitas program perlindungan sosial pemerintah seperti bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan lainnya (Apriyanti & Rospida, 2025). Program perlindungan sosial memiliki hubungan erat dengan peningkatan IPM karena bantuan seperti PKH, BPNT, PIP, dan JKN/KIS membantu meringankan beban pengeluaran rumah

tangga miskin, memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berkontribusi pada perbaikan dimensi penyusun IPM, khususnya standar hidup layak, dan pada saat yang sama menekan tingkat kemiskinan (Diana & Yustie, 2025).

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai Indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan di Indonesia, seperti penelitian Budhijana (2019) menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Putri & Vidriza (2025) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara IPM dan kemiskinan di Provinsi Papua Barat, memperkuat bukti bahwa peningkatan kualitas hidup dapat mengurangi kemiskinan di berbagai wilayah. Selanjutnya, menekankan bahwa perbaikan standar hidup, sebagai komponen integral dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga rekomendasi kebijakan diarahkan pada upaya meningkatkan standar hidup masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan (Ayu Setiyani *et al.*, 2024).

Pertumbuhan populasi merupakan salah satu indikator krusial dalam konteks pembangunan suatu negara. Para ekonomi klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, bahkan memandang jumlah penduduk sebagai input potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi guna meningkatkan output suatu rumah tangga atau perusahaan. Dengan demikian, semakin besar populasi, semakin melimpah pula tenaga kerja yang tersedia untuk dimobilisasi (Zulfa *et al.*, 2016)

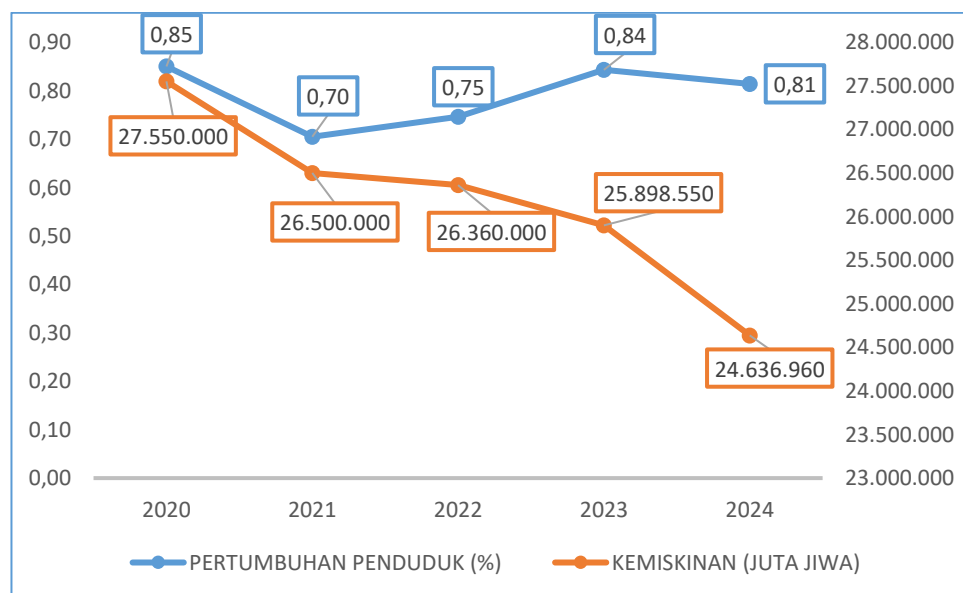
Menurut Beno *et al.*, (2022) Laju pertumbuhan penduduk didefinisikan sebagai indikator yang mengukur persentase peningkatan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Pengendalian terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk merupakan langkah krusial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan rakyat.

Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang melimpah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas sering kali mengakibatkan tingginya angka pengangguran di kalangan tenaga kerja, yang pada gilirannya memicu peningkatan tingkat kemiskinan. Akibatnya, peningkatan populasi penduduk cenderung berkorelasi positif dengan eskalasi kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah umumnya menerapkan kebijakan yang bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, seperti melalui program Keluarga Berencana (KB) (Margaretha *et al.*, 2023).

Pertumbuhan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan (Anita *et al.*, 2022). Hal ini dikarenakan salah satunya memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam perekonomian suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Puspita Candra Bella & Syamsul Huda, 2023).

Menurut Malthus (1798) dalam (Raharto, 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan ketersediaan sumber daya dan kesempatan ekonomi, sehingga dapat menurunkan pendapatan per kapita dan meningkatkan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan penduduk Indonesia masih terus bertambah, tetapi pertumbuhannya mulai lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Indonesia sedang berubah, terutama karena angka kelahiran menurun, layanan kesehatan membaik, dan keluarga semakin sadar pentingnya perencanaan jumlah anak. Meski begitu, jumlah penduduk yang besar tetap perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja agar tidak menambah tekanan terhadap kesejahteraan Masyarakat (Danil & Rochayati, 2025).

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan penduduk dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.5 dibawah ini



Gambar 1. 5 Grafik Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2024

Sumber : *World Bank*, 2024

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk dan kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi. Tahun 2020 pada angka 0,85% Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin mencapai 27.55 juta menjadi level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan menurunkan daya beli masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan serta terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan faktor yang dapat memperbesar kemiskinan, terutama ketika pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, meskipun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 tergolong tidak terlalu tinggi, tekanan ekonomi yang besar menyebabkan tingkat kemiskinan tetap berada pada level yang tinggi (Sumarsono et al., 2022).

Pada tahun 2021, angka pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,70%, jumlah penduduk miskin juga terus mengalami penurunan 26,50 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 3,30% Pada tahun 2021, penurunan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dikaitkan dengan melambatnya angka kelahiran. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan jumlah anak serta berlanjutnya pelaksanaan program Keluarga Berencana. Selain itu, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 juga mendorong sebagian masyarakat untuk menunda memiliki anak, karena adanya ketidakpastian terhadap pendapatan, biaya hidup, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Sukamdi et al., 2021).

Ditahun berikutnya, Pertumbuhan penduduk di Indonesia mulai mengalami peningkatan pada angka 0,75% persen pada 2022 dan naik menjadi 0,84% pada tahun 2023 dan kembali mengalami penurunan 0,81% pada tahun 2024, sementara jumlah penduduk miskin terus menurun dari 26,36 juta jiwa pada 2022 menjadi 24,63 juta jiwa pada 2024. Penurunan ini didorong oleh menurunnya tingkat, inflasi yang makin terkendali, naiknya nilai tukar petani, membaiknya konsumsi rumah tangga, dan penyaluran bansos yang efektif tekanan terhadap kemiskinan berhasil ditahan oleh faktor ekonomi dan kebijakan sosial tersebut (REPUBLIKA.CO.ID, 2023).

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan di Indonesia bersifat kompleks dan tidak linear. Kajian terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, karena kemampuan ekonomi per kapita menurun akibat tekanan pada sumber daya (Salsabila *et al.*, 2022). Namun, dalam konteks tahun 2020-2024, penurunan angka kemiskinan yang konsisten meskipun terdapat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi menandakan keberhasilan sebagian pemerintah dalam mengelola faktor-faktor pengentasan kemiskinan, seperti penyaluran bantuan sosial, kebijakan ketenagakerjaan, dan pengendalian harga pangan utama yang sangat berpengaruh pada kelompok miskin.

Dapat dilihat dari berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa isu kemiskinan di Indonesia masih menjadi topik kajian yang luas dengan pendekatan dan variabel yang beragam. Sejumlah penelitian terdahulu seperti yang dilakukan

oleh (Beno *et al.*, 2022) dan (Salsabila *et al.*, 2022) menyoroti hubungan antara pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan, dengan hasil yang menunjukkan hubungan positif tetapi tidak signifikan, serta dukungan terhadap teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memperburuk kemiskinan. Sementara itu, penelitian oleh (Hasan, 2021) serta (Boari *et al.*, 2024) lebih menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pada tingkat internasional, penelitian oleh (Taruno, 2019) dan (Kurniawan *A. et al.*, 2021) menambahkan dimensi makroekonomi dengan meneliti keterkaitan antara pengeluaran publik, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran publik pada sektor kesehatan dan pendidikan berperan signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan variabel tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan.

Walaupun sejumlah penelitian sebelumnya telah menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia, masih ditemukan ketidaksesuaian temuan empiris serta keterbatasan pendekatan metodologis yang mendasar. Mayoritas studi tersebut menghasilkan temuan yang bervariasi, di mana sebagian variabel menunjukkan pengaruh negatif signifikan sementara yang lain tidak, penggunaan metode regresi statis yang tidak dinamis, serta minimnya integrasi keempat variabel secara serempak dalam skala nasional.

Lebih lanjut, belum terdapat kajian deret waktu jangka panjang (1995-2024) yang secara khusus menguji dinamika efek jangka pendek dan jangka panjang melalui model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dengan data gabungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank, termasuk untuk menggambarkan transisi pra/pasca-pandemi COVID-19 serta bonus demografi. Dengan demikian, penelitian ini mengatasi celah penelitian tersebut dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia”** melalui pendekatan ARDL berbasis data tahunan nasional periode 1995-2024, bertujuan menghasilkan bukti empiris yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam penanggulangan kemiskinan struktural di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang informasi yang diberikan di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan panjang?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan panjang?
4. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam ranah kajian makroekonomi yang menelaah dinamika kemiskinan.

Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pusat Statistik (BPS), diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat, karena ukuran kemiskinan perlu disesuaikan dengan perubahan harga kebutuhan pokok dari waktu ke waktu.
2. Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah, terutama pada sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan produksi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan Masyarakat
3. Bagi Kementerian Pendidikan, budaya, riset dan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui perbaikan akses dan mutu pendidikan, masyarakat akan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan kualitas SDM ini membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
4. Untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk memperkuat upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga, penyuluhan kependudukan, dan peningkatan kualitas keluarga. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk dapat dikelola sehingga tidak menjadi hambatan dalam upaya pengentasan kemiskinan